



BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan

Mencermati potensi sumberdaya alam yang tersedia baik di darat maupun di laut dan potensi sosial ekonomi yang telah terbangun selama ini, maka permasalahan pokok yang dihadapi adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada melalui upaya peningkatan nilai tambah sumberdaya alam dengan mengembangkan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru dan pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah.

Saat ini potensi sumberdaya alam seperti tambang, pertanian dalam arti luas, potensi hutan serta potensi kelautan dan perikanan cukup tersedia dalam jumlah yang besar. Potensi tersebut belum dikelola secara intensif bahkan belum memberikan nilai tambah yang berarti karena masih diperdagangkan antar pulau dan diekspor masih dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah. Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan daerah baik secara ekonomi maupun finansial.

Lebih dari itu permasalahan pembangunan Sulawesi Tenggara tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, tetapi juga terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia secara kuantitatif maupun kualitatif, permasalahan pelayanan pemerintahan yang dirasakan masih belum optimal, pengembangan ekonomi rakyat dan investasi yang masih timpang, pembangunan kebudayaan yang masih berorientasi kepada pelaksanaan seremonial konsumtif, ketimbang pengembangan kebudayaan yang kreatif, inovatif dan produktif serta belum tersedianya pelayanan infrastruktur secara merata guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan pemerintahan.

Beberapa permasalahan pokok yang terkait dengan masalah-masalah tersebut di atas diuraikan sebagai berikut.

4.1.1. Permasalahan dan Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

4.1.1.1. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pendidikan

Dalam kurun waktu 2008-2013 Pemerintah Sulawesi Tenggara telah mencanangkan wajib belajar (WAJAR) 12 tahun. Hingga saat ini rata-rata capaian angka partisipasi murni pendidikan dasar 87,95%. Hal ini belum memenuhi target MDG's 2015 yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk APM pendidikan menengah baru mencapai 71,66%.



Kalau di lihat dari angka rasio guru murid untuk semua tingkat pendidikan masih di bawah 1 : 13, ini berarti masih jauh di bawah angka rasio ideal yaitu 1 : 36. Permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya distribusi guru, terutama pada daerah-daerah terpencil, karena kecenderungan guru-guru terkonsentrasi pada daerah perkotaan, mulai dari kota kecamatan hingga provinsi. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya fasilitas penunjang pendidikan seperti alat peraga dan laboratorium, termasuk belum terpenuhinya target ketersediaan sekolah menengah secara merata di setiap kecamatan.

Kondisi seperti ini mengakibatkan terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah.

4.1.1.2. Permasalahan Isu Strategis Bidang Kesehatan

Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan telah dilakukan dalam kurun waktu 2008-2013, meliputi layanan kesehatan personal dan layanan kesehatan masyarakat, melalui program pengobatan gratis terhadap penduduk miskin, mulai dari rawat jalan hingga rawat inap hingga kelas III. Selain itu pemerintah provinsi juga memberikan bantuan dana terhadap puskesmas untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan promotif. Namun demikian belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat terutama yang berada dipedesaan.

Terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat juga disebabkan oleh belum terpenuhinya secara kuantitatif serta distribusi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan dan kebidanan serta penyebaran tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan lain-lain.

Di lain pihak kondisi geografi Sulawesi Tenggara yang berbukit hingga bergunung serta terdiri dari kepulauan menyebabkan sulitnya tenaga medis untuk menjangkau masyarakat dan sebaliknya masyarakat sulit untuk mengakses pusat-pusat pelayanan kesehatan.

4.1.1.3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB

Salah satu program unggulan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah pelaksanaan program KB Bahteramas, yang diintegrasikan dengan pembiayaan dana *Block Grant* kepada lurah dan kepala desa. Melalui program KB Bahteramas penjangkauan kepesertaan pasangan usia subur meningkat.

Walaupun demikian program ini belum mampu menjangkau pasangan usia subur dalam jumlah yang signifikan guna menekan angka kelahiran di Sulawesi Tenggara.

Permasalahan lainnya dapat disebabkan oleh bergesernya nilai-nilai masyarakat terhadap kehidupan berkeluarga akibat semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat.



Kondisi kemasyarakatan seperti ini mengakibatkan berkurangnya beban biaya keluarga sehingga mendorong terjadinya penambahan anggota keluarga (anak).

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

4.1.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pertanian dalam arti luas

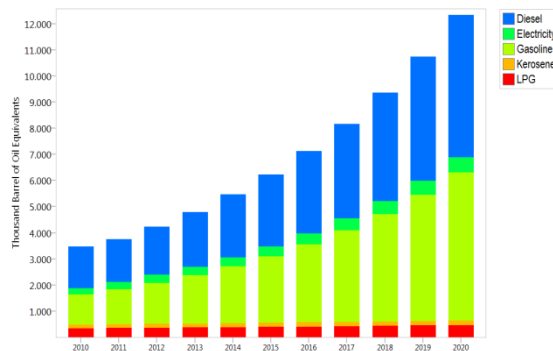
Salah satu capaian penting dalam pembangunan pertanian dalam arti luas tahun 2008-2013 adalah keberhasilan dalam mempertahankan peningkatan produksi padi di atas 5% secara berturut-turut, peningkatan produksi dan perluasan perkebunan melalui Program Gerakan Nasional (Gernas) kakao, produksi tanaman hortikultura serta peningkatan populasi ternak.

Walaupun terjadi peningkatan produksi secara signifikan terhadap komoditas tersebut, namun bila dibandingkan dengan potensi pengembangan lahan tanaman pangan yang mencapai ± 265.000 ha, memungkinkan untuk melakukan perluasan terhadap lahan pertanian yang ada. Permasalahan lainnya terkait dengan ketersediaan infrastruktur pengairan, pengembangan organisasi petani, ketepatan penyediaan saprodi dan mekanisasi dalam pengolahan tanah. Jumlah penyuluh saat ini yang baru mencapai 957 orang, masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas wilayah pertanian dan petani yang harus dilayaninya.

4.1.2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Kehutanan

Pembangunan Bidang Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 ditekankan kepada rehabilitasi dan produksi hasil hutan. Beberapa capaian dalam tahun 2008-2013 terkait dengan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan adalah seluas ± 60.360 ha yang dilaksanakan melalui kegiatan penghijauan lingkungan dan perhutanan sosial (*Social Forestry*). Sedangkan upaya-upaya produksi hutan dilakukan melalui peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Upaya-upaya ini akan terus ditingkatkan pada periode tahun 2013-2018 dengan memperhatikan berbagai permasalahan di Bidang Kehutanan.

4.1.2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Energi



Proyeksi demand Energi Sulawesi Tenggara

Pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan lokal menyebabkan kebutuhan konsumsi energi primer menjadi tinggi. Permintaan terhadap energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, industri dan transportasi. Pemanfaatan terbesar energi primer didominasi oleh sektor transportasi dan listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan energi primer maka ke depan

krisis energi dan bahan bakar akan semakin tinggi.

Di lain pihak ketersediaan energi alternatif seperti air, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio massa cukup potensial untuk dikembangkan. Potensi pengembangan energi air di Sulawesi Tenggara yang meliputi Sungai Konawe, Lasolo, Lalindu, Tamboli mencapai ± 120 MW. Demikian juga potensi panas bumi di Lainya dan Mangolo mencapai ± 20 MW, yang belum dimanfaatkan.

4.1.2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pertambangan

Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertambangan mineral seperti aspal, nikel dan emas serta beberapa bahan tambang sangat besar. Bila dikelola dengan baik maka potensi tersebut akan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Beberapa permasalahan pembangunan pertambangan yang dihadapi adalah masih belum sinkronnya regulasi sektoral dan antara sektoral dengan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, pengelolaan lingkungan kawasan tambang terutama yang berada dalam kawasan hutan seperti pembukaan hutan yang berdampak pada terganggunya fungsi hidrologi yang mengakibatkan banjir dan kekeringan. Pembukaan lahan tambang juga tidak diikuti dengan reklamasi lahan pasca tambang, yang mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Memperhatikan prinsip konservasi masih sangat dominan, persoalan sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang juga belum tertangani dengan baik, sehingga tidak jarang terjadi berbagai konflik horizontal maupun vertikal.



4.1.2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 berfokus pada upaya meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik produk destinasi dan promosi pariwisata. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Sulawesi Tenggara menyelenggarakan event pariwisata internasional dan nasional antara lain Festival Layang-layang Internasional tahun 2009, Seminar Penaskahan Nusantara (ATL) tahun 2009, Kemilau Sulawesi ke-IV tahun 2009, Sail Indonesia (Wakatobi – Belitong) tahun 2010, Pemilihan Duta Wisata Indonesia tahun 2010, Direct Promotion Sulawesi Tenggara di Bali (Sultra Fiesta Faganza) tahun 2010 dan Festival Keraton Nusantara ke – VIII tahun 2012 dengan melibatkan peserta dari industri pariwisata dalam dan Luar negeri. Disamping itu juga salah satu agenda tahunan bidang promosi adalah pelaksanaan kalender event pariwisata HALO Sultra yang dilaksanakan diberbagai kabupaten/kota dan secara rutin mengikuti pasar wisata Indonesia antara lain Tourism Indonesia Mart and Expo, The Indonesian Tourisme and travel fair, Deep and Extreme Indonesia, Fiesta Nusa Dua dan Pekan Produk Kreatif Indonesia.

Capaian pembangunan bidang pariwisata 2008-2013 adalah jumlah kunjungan wisatawan mencapai 8.547.551 orang, rata-rata tingkat hunian hotel 39,11 % dan rata-rata lama tinggal wisatawan 2,25 hari.

Permasalahan dalam pembangunan kepariwisataan adalah belum optimal pengembangan destinasi terutama infrastruktur, terbatasnya promosi pariwisata dan belum adanya kalender wisata secara permanen. Dengan demikian walaupun potensi pariwisata cukup tersedia tetapi belum dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

4.1.2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Kelautan dan Perikanan

Fokus pembangunan di Bidang Perikanan pada periode Tahun 2008-2013 adalah pada usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Capaian produksi perikanan tangkap baru mencapai 15,41% dibanding potensi perikanan tangkap yang tersedia. Demikian pula halnya dengan capaian produksi budidaya laut yang baru mencapai 5,02% dari potensi pemanfaatan lahan budidaya laut. Selaian itu capaian terhadap budidaya payau juga baru mencapai 26,66% dan perikanan air tawar 4,75% dari potensi lahan budidaya yang tersedia.

Permasalahan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah terbatasnya sarana prasarana perikanan tangkap seperti kapal tangkap moderen, rumpon atau rumah ikan, alat tangkap yang ramah lingkungan dan teknologi penginderaan untuk melacak keberadaan ikan. Secara tradisional di beberapa tempat masih tetap ada penggunaan bom untuk mengambil ikan. Tindakan seperti ini sangat merusak karang dan biota laut lainnya.



Demikian pula halnya dengan potensi pengembangan perikanan budidaya dan jasa lingkungan untuk pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, walaupun cukup menjanjikan penghasilan yang cukup besar.

4.1.2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pada periode tahun 2008-2013, di Bidang Perindustrian di Sulawesi Tenggara belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri baru sebesar 7% dari total PDRB Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan karena sektor industri masih didominasi oleh industri kecil, yang kemampuannya dalam mengolah sumber daya alam daerah masih terbatas. Industri kecil dan menengah mencapai sekitar 99,8% dari total industri di Sulawesi Tenggara.

Pada periode 2013-2018, diharapkan sektor industri tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi, sesuai dengan visi pembangunan Sulawesi Tenggara yaitu mendorong daya saing dan kemandirian melalui proses nilai tambah sumberdaya alam.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor industri adalah masih belum jelasnya regulasi terutama pada sektor industri pertambangan, investasi yang mahal karena berteknologi tinggi dan pembagian kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang belum jelas. Selain itu perlu adanya kejelasan terhadap berbagai regulasi terutama dari sisi pelayanan seperti kepastian waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan pembangunan industri.

4.1.2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Arah kebijakan utama Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2008-2013 adalah perbaikan iklim ketenagakerjaan. Perbaikan iklim ketenagakerjaan ini sangat erat hubungannya dengan perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim berusaha. Iklim ketenagakerjaan yang baik akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Adapun hasil yang telah dicapai pada tahun 2008-2013 adalah terciptanya pasar kerja yang luwes hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 56.138 orang atau 5,73 % di tahun 2008 menjadi sebesar 41.078 orang atau 4,04 % pada tahun 2012.

Dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah selain melalui pengembangan kawasan agropolitan/ minapolitan, kawasan sentra produksi dan kawasan klaster industri dan berbagai pembangunan sektoral, juga dilakukan melalui pengembangan kawasan transmigrasi berupa



wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah mengarah kepada skema kota terpadu mandiri (KTM).

Adapun hasil yang telah dicapai bidang ketransmigrasian pada tahun 2008-2013 adalah penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi seluas 4.560 ha di enam kabupaten, pembangunan pemukiman transmigrasi baru terintegrasi dengan pemugaran permukiman penduduk setempat pada 14 kawasan serta pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga sebanyak 3.110 unit. Sedangkan pada tahun 20013-2018, bidang ketransmigrasian, fokus pada integrasi pembangunan kawasan perdesaan sebagai *hinterland* dengan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah bagaimana meningkatkan kesempatan kerja secara merata yang layak bagi penduduk usia produktif pada seluruh sektor pembangunan, mendorong keserasian kondisi dan mekanisme hubungan industrial dan mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan lokal yang baru.

4.1.2.9. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus pembangunan Bidang Lingkungan hidup periode 2008-2013 ditekankan kepada pembinaan sumberdaya manusia, kelembagaan dan pelayanan sektor lingkungan hidup. Beberapa capaian dalam periode tersebut di atas antara lain peningkatan kapasitas aparat bidang pengelolaan lingkungan hidup, terbentuknya kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan serta pengawasan dan perizinan bidang lingkungan.

Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumberdaya alam bidang pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pertambangan. sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah periode 2013-2018 yaitu peningkatan nilai tambah sumberdaya alam melalui industrialisasi, maka permasalahan lingkungan hidup akan menjadi salah satu tantangan yang penting dan strategis.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bidang lingkungan hidup adalah masih terbatasnya sumberdaya manusia dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terbatasnya penyelesaian kewajiban penyelesaian dokumen AMDAL (7,36%) oleh pemrakarsa wajib AMDAL, belum optimalnya pemantauan lingkungan ($\pm 24\%$) dari wajib AMDAL yang telah memiliki dokumen AMDAL.

4.1.3. Permasalahan Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Fokus penyelenggaraan agenda revitalisasi pemerintahan daerah tahun 2008-2013 meliputi reformasi birokrasi, reformasi keuangan daerah dan revitalisasi sistem pengadaan



barang dan jasa pemerintah. Beberapa capaian pembangunan pada reformasi birokrasi yaitu penyesuaian struktur pemerintahan, peningkatan disiplin dan kapasitas aparat daerah serta peningkatan kesejahteraan PNS melalui tambahan perbaikan penghasilan. Capaian pada reformasi keuangan daerah antara lain desentralisasi fiskal melalui bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, perbaikan sistem akuntansi pemerintahan dan sistem perencanaan anggaran. Sedang capaian pada reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah terbangunnya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) yang berhasil meraih predikat terbaik kategori *user support Performance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi pada kurun waktu pembangunan 2008-2013 antara lain masih diperlukan peningkatan disiplin dan kinerja aparat serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai. Pada penyelenggaraan reformasi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dan masih belum dicapainya predikat WTP pada evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Walaupun sistem pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapi sampai saat ini belum beroperasinya secara optimal unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) serta beberapa regulasi pendukung lainnya.

Fokus pemberdayaan masyarakat desa tahun 2008-2013 adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu keberhasilan dari kegiatan tersebut melalui dana *Block Grant* adalah terbangunnya kantor desa sekitar 91% dari total jumlah 1.908 desa/kelurahan di Sulawesi Tenggara.

Pengembangan 10 program pokok PKK dan pelaksanaan pelestarian adat dan budaya telah dilakukan dengan capaian peningkatan SDM keluarga, peningkatan ekonomi keluarga dan penguatan kelembagaan PKK. Dalam periode 2008-2013 pencapaian program PKK adalah $\pm 50\%$ dengan demikian, pelaksanaan program PKK 2013-2018 masih perlu ditingkatkan

Pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna pedesaan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2008-2013 adalah pengembangan energi alternatif, alat pengolah hasil pertanian dalam arti luas dan lainnya. Upaya-upaya ini masih perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu pengembangan ekonomi desa berfokus pada pengembangan pasar desa dan keuangan mikro atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes). Pada tahun 2008-2013 BUMDes yang telah di bentuk baru sekitar $\pm 5\%$ dari total desa/kelurahan yang



ada. Dengan demikian masih sekitar 95 % yang masih perlu ditingkatkan agar target setiap desa dapat memiliki 1 lembaga keuangan.

Secara kuantitas, pembinaan kelembagaan desa tahun 2008-2013 telah dilaksanakan berupa pembinaan kepada pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Di tahun 2013-2018 fokus pembangunan seperti disebutkan di atas masih akan terus dilanjutkan.

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Kebudayaan

Penggalan terhadap nilai-nilai seni budaya dan pengembangan situs-situs budaya cukup mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan di Sulawesi Tenggara 2008-2013. Tetapi belum semua nilai dan situs budaya dapat teraktualisasi secara menyeluruh dalam rangka memperkaya budaya nasional. Di lain pihak saat ini dirasakan semakin terdegradasi nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal serta contoh teladan.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Dasar, kewilayahan serta Kawasan Strategis

4.1.5.1. Permasalahan Pekerjaan Umum

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum, pemukiman dan infrastruktur sumberdaya air berada dalam kondisi baik hingga rusak. Pembangunan jalan dan jembatan sejak tahun 2008-2012 telah berhasil meningkatkan kondisi baik sekitar 72%, pembangunan permukiman layak huni sekitar 55% dan layanan irigasi sekitar $\pm 65,12\%$. Kenyataan ini belum memenuhi harapan, karena itu perlu terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan ketersediaan sumberdaya alam dan potensi pembangunan kedepan, maka kebutuhan pembangunan jalan jembatan akan terus dikembangkan dalam rangka pencapaian visi dan misi 2013-2018. Demikian pula halnya dengan pencapaian pembangunan permukiman dan sumberdaya air serta penataan ruang.

4.1.5.2. Permasalahan Bidang Perhubungan

Upaya pembangunan transportasi darat, laut dan udara dalam lima tahun terakhir juga memperlihatkan kemajuan yang berarti. Sejalan dengan pembangunan jalan dan jembatan yang telah mencapai kondisi baik sekitar 72%, maka saat ini pelayanan transportasi dasar yaitu angkutan darat dan feri serta pelayaran perintis dan pelayaran rakyat dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa kepulauan di provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.



Walaupun demikian kondisi ini dirasakan belum memadai dari segi pelayanan baik transportasi darat, penyeberangan maupun pelayaran laut. Kondisi angkutan darat yang belum menjamin kenyamanan penumpang, penyeberangan yang belum sesuai jadwal dan frekuensi yang dirasakan masih kurang serta pelayaran laut baik pelayaran rakyat maupun pelayanan jasa pelayaran yang belum dapat menjangkau semua daerah kepulauan, merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pelayanan pemerintahan, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

4.1.5.3. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana

Fokus pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana tahun 2008-2013 adalah penguatan kelembagaan dengan membentuk BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai saat ini telah terbentuk kelembagaan BPBD Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) dan di 12 kabupaten/kota. Selain peningkatan aparatur penanggulangan bencana berupa sosialisasi peraturan penanggulangan bencana seperti manajemen dasar bencana, pembentukan tim reaksi cepat (TRC) unsur pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat.

Beberapa hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana pada periode 2008-2013 adalah penyusunan rencana kontingensi, simulasi penanggulangan banjir yang melibatkan Dinas Sosial, TNI, Polri, SAR, ORARI, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta pembagian tugas masing-masing *stakeholder* yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

Pada saat terjadi tanggap darurat, BPBD sebagai unsur pelaksana mengkoordinasikan kepada instansi terkait dan *stakeholder* lainnya tentang kondisi dan strategi penanganannya. BPBD provinsi dan kabupaten menugaskan TRC yang bertugas untuk melihat dan mengkaji secara cepat kerusakan di lapangan baik prasarana pemerintah, masyarakat, lingkungan maupun korban jiwa.

Sarana dan prasarana yang telah ada saat ini antara lain truk serba guna, pengolah air bersih, kendaraan komando *rescue*, dapur umum lapangan, mobil sarana komunikasi, mobil ambulans, tenda, kendaraan roda dua, perahu karet, *speed boat* telah tersedia namun sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan pemanfaatannya.



4.2. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Secara umum permasalahan yang dihadapi dapat dipetakan ke dalam faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Faktor Internal

4.2.1.1. Kekuatan

Beberapa kekuatan seperti tersedianya potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial lainnya merupakan kekuatan untuk mempercepat pembangunan Sulawesi Tenggara, potensi dimaksud seperti :

- Potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman (terutama jati);
- Potensi pertambangan nikel, pasir kuarsa, dan minyak bumi;
- Potensi perikanan tambak ikan dan udang;
- Potensi perikanan tangkap;
- Potensi hasil laut selain ikan;
- Potensi budidaya perikanan laut;
- Potensi sumberdaya Pariwisata Hoga dan wisata budaya Keraton Buton serta situs budaya lainnya yang bernilai sejarah;
- Potensi sumberdaya manusia seperti petani dan nelayan yang cukup terampil;
- Ketersediaan sumber-sumber keuangan untuk modal usaha;
- Keberadaan lembaga pemerintah hingga ke daerah terpencil; dan
- Akses ke seluruh wilayah telah terbuka dan dapat dijangkau.

4.2.1.2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian adalah :

- Lemahnya permodalan bagi usaha kecil menengah maupun usaha besar;
- Masih terdapat beberapa peraturan perundangan sektoral maupun daerah yang bertentangan;
- Adanya pembagian kewenangan yang tidak berimbang dan bertentangan dengan hirarki pemerintahan; dan
- Belum tertatanya jaringan tata niaga yang memungkinkan para petani dan nelayan dapat menjual hasilnya dengan harga yang menguntungkan.



4.2.2. Faktor Eksternal

4.2.2.1. Peluang

Beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan Sulawesi Tenggara adalah :

- Tingginya minat investasi terhadap pengelolaan sumberdaya alam;
- Beberapa produk pertanian dalam arti luas dan perikanan seperti kakao, merica, ternak sapi, ikan tangkap, ikan kerapu, lobster dan hasil laut serta hasil hutan cukup dikenal di pasar nasional maupun internasional;
- Tersedianya lembaga-lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan daerah; dan
- Dukungan regulasi di sektor pertambangan yang memungkinkan pembangun industri pengolahan dalam rangka peningkatan nilai tambah secara lokal.

4.2.2.2. Ancaman

- Kuatnya daya tarik pasar di luar Sulawesi Tenggara yang menyebabkan produksi di daerah ini di jual dan diekspor melalui daerah lain;
- Belum terbentuknya lembaga-lembaga pemasaran yang mampu mempromosikan produksi di daerah ini;
- Masuknya pemodal dan tenaga-tenaga terampil yang mengelola sumberdaya alam di daerah ini secara langsung, sehingga mengurangi peluang masyarakat setempat;
- Beroprasinya kapal-kapal nelayan luar daerah dengan teknologi yang lebih canggih, sehingga masyarakat di daerah ini tidak dapat bersaing; dan
- Dampak nasionalisasi dan globalisasi perdagangan yang menyebabkan terpuruknya pengusaha dan masyarakat lokal.

4.3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan serta analisis faktor-faktor internal dan eksternal maka beberapa isu strategis yang terkait dengan agenda utama pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

4.3.1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode Tahun 2013 – 2018 difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

4.3.1.1. Isu strategis dalam pembangunan bidang pendidikan

Isu strategis dalam pembangunan bidang pendidikan pada RPJMD 2013-2018 meliputi :



- a. Isu peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana, distribusi sekolah dan dukungan infrastruktur lainnya, sedang
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar dan kualitas lulusan.

4.3.1.2. Isu strategis pembangunan bidang kesehatan

Isu strategis pembangunan bidang kesehatan meliputi :

- a. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian sebagai akibat penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kekurangan gizi;
- b. Belum terpenuhinya SDM kesehatan sesuai kebutuhan;
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- d. Masih terkendalanya beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu; dan
- e. Berkurangnya minat masyarakat dalam ber-KB.

4.3.1.3. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Isu strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pendidikan politik kaum perempuan dalam pengambilan keputusan politik;
- b. Perlunya dorongan terhadap kemandirian kaum perempuan dalam pengambilan keputusan; dan
- c. Perlunya reorientasi terhadap pendekatan pembangunan keluarga berencana.

4.3.2. Isu strategis pembangunan Ekonomi

Beberapa fokus penting dalam pembangunan ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2013 – 2018 difokuskan pada pembangunan pertanian dalam arti luas, kehutanan, energi dan pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.3.2.1. Isu strategis Pembangunan Pertanian dalam arti luas

Isu strategis pembangunan bidang pertanian dan peternakan serta perkebunan dan hortikultura adalah :

- a. Peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan populasi ternak;
- b. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana, teknologi pengolahan;
- c. Terbatasnya akses petani ke lembaga keuangan dan rendahnya nilai tukar petani;
- d. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;



- e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani; dan
- f. Kurangnya jumlah dan kompetensi penyuluh.

4.3.2.2. Isu Strategis dalam bidang Kehutanan.

Beberapa isu penting dalam pembangunan bidang kehutanan tahun 2013-2018 adalah :

- a. Pemantapan kawasan hutan (penggunaan kawasan hutan);
- b. Rehabilitasi : Didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan (rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS);
- c. Produksi : kayu dan non kayu (revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan); dan
- d. Penyelesaian konflik dan tekanan.

4.3.2.3. Isu Strategis Bidang Energi

Isu strategis Bidang Energi adalah :

- a. Mengembangkan energi alternatif sesuai dengan potensi daerah. Gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan energi alternatif air, surya, panas bumi, gelombang, *bio massa*; dan
- c. Terbatasnya infrastruktur energi terutama sektor kelistrikan (pembangkit listrik, jaringan, gardu).

4.3.2.4. Isu Strategis Bidang Pertambangan

Isu strategis Bidang Pertambangan meliputi :

- a. Pengelolaan yang lebih arif dan bijaksana terhadap potensi sumberdaya mineral daerah;
- b. Mendorong terciptanya nilai tambah dari sumberdaya mineral daerah; dan
- c. Menciptakan keterkaitan antar sektor terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dasar wilayah.

4.3.2.5. Isu Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Isu strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

- a. Pengembangan sumberdaya manusia kepariwisataan;
- b. Pengembangan daya tarik produk pariwisata di destinasi;
- c. Peningkatan peran industri pariwisata & ekonomi kreatif; dan
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan.



4.3.2.6. Isu Strategis Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Isu Strategis yang terkait dengan pengembangan bidang kelautan dan perikanan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap;
- b. Belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya;
- c. Kurangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan;
- d. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. Masih tingginya *illegal, unreported, unregulated fishing*.

4.3.2.7. Isu Strategis Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Isu strategis terkait dengan pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kemampuan industri dalam mengolah potensi sumberdaya alam;
- b. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah;
- c. Rendahnya kemampuan teknologi industri kecil menengah yang ada di daerah;
- d. Rendahnya daya saing produk industri dan perdagangan;
- e. Rendahnya kemampuan permodalan sebagian besar industri kecil dan menengah yang ada di daerah;
- f. Minimnya industri skala besar yang mengolah potensi sumberdaya alam di daerah;
- g. Masih adanya hambatan dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat pada tingkat harga yang wajar dan terjangkau;
- h. Terbatasnya jenis komoditi dan negara tujuan ekspor;
- i. Masih rendahnya penerapan tertib ukur dan perlindungan konsumen; dan
- j. Belum ada sistem inovasi daerah yang dapat mendorong daya saing produk-produk lokal.

4.3.2.8. Isu Strategis Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Isu strategis Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

- a. Masih rendahnya kesempatan kerja yang layak dan produktif;
- b. Belum optimalnya pengembangan kesempatan kerja secara merata dalam sektor-sektor pembangunan;
- c. Belum serasinya kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja; dan
- d. Belum terintegrasinya satuan-satuan permukiman transmigrasi menjadi satu kesatuan pengembangan wilayah transmigrasi secara terpadu mandiri.



4.3.2.9. Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Isu strategis Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam periode 2013-2018 adalah :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- b. Memantapkan kelembagaan dan pelayanan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. Mengefektifkan serta mengintensifkan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- d. Pengembangan sistem pengendalian lingkungan hidup terkait dengan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam melalui industrialisasi.

4.3.3. Isu strategis Revitalisasi Pemerintahan Daerah

4.3.3.1. Isu Strategis Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Isu strategis revitalisasi pemerintahan daerah tahun 2013-2018 adalah :

- a. Belum optimalnya disiplin dan kinerja aparat serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai;
- b. Masih perlunya peningkatan/pengembangan prasarana pemerintahan;
- c. Sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan belum tepat waktu;
- d. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan;
- e. Masih perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparat dan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Belum optimalnya unit pengadaan barang dan jasa; dan
- h. Belum tercapainya pelayanan prima.

4.3.3.2. Isu Strategis Pemberdayaan Masyarakat

Dengan demikian isu pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Masih perlunya dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Masih perlu peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
- c. Masih belum optimalnya kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Belum optimalnya 10 program pokok dan penguatan kelembagaan PKK;
- e. Belum optimalnya pengembangan adat dan budaya lokal; dan
- f. Belum meratanya pemanfaatan pengembangan teknologi tepat guna.

4.3.4. Isu Strategis Pemantapan Pembangunan Kebudayaan

Isu strategis pembangunan Bidang Kebudayaan tahun 2013-2018 adalah :

- a. Bergesernya nilai-nilai kearifan lokal dan budi pekerti serta karakter bangsa;



- b. Perlu lebih ditingkatkan penggalian nilai-nilai seni dan situs budaya; dan
- c. Perlunya penguatan dan peningkatan peran lembaga-lembaga adat.

4.3.5. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis

4.3.5.1. Isu Strategis Bidang Pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis

Isu strategis Bidang Pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis adalah :

- a. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya air;
- b. Belum mantapnya kondisi ruas jalan dan jembatan;
- c. Terbatasnya pengembangan permukiman;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang; dan
- e. Belum terbangunnya infrastruktur pada kawasan strategis provinsi.

4.3.5.2. Isu Strategis Bidang Perhubungan

Isu strategis pembangunan Bidang Perhubungan pada periode tahun 2013 – 2018 adalah :

- a. Belum optimalnya pelayanan dasar jasa transportasi;
- b. Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan; dan
- c. Belum optimalnya sistem pelayanan, administrasi pemerintahan dan pelayanan jasa perhubungan.

4.3.5.3. Isu Strategis Bidang Penanggulangan Bencana

Isu strategi pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana tahun 2013-2018 adalah :

- a. Masih rendahnya sumberdaya aparatur penanggulangan bencana;
- b. Belum memiliki sarana prasarana secara memadai untuk mendukung usaha-usaha penanggulangan bencana serta pemeliharaan peralatan kebencanaan; dan
- c. Masih lemahnya koordinasi antar level pemerintahan, antar sektor dan antar wilayah.